



OPTIMALISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Asha Mutiara Dimaputri^{1,3}, Mujahidin²

¹Pemerintah Kota Balikpapan

²Institut pemerintahan Dalam Negeri

³corresponding author: ashamutiara2@gmail.com

ABSTRACT

Balikpapan city is one of the cities that is considered as a buffer for the capital of the archipelago, but still has the risk of bencana. Furthermore, until now, there has been no research that discusses the optimization of Disaster Preparedness villages as part of solutions to disasters. Related to this, this study aims to obtain a general overview of the optimization of Disaster Preparedness village in disaster mitigation in the city of Balikpapan, East Kalimantan province. The research method is qualitative. The authors conducted semi-structured interviews, observations and documentation on the collection of research data. The results showed that the objective dimension shows that the community has understood the purpose of the formation of KSB but the community has not understood the various forms of disaster mitigation that exist. The alternative dimension of decision shows that the alternative decision taken by the Balikpapan City Social Service is through community participation in the implementation of the KSB program with the number of KSB formed. The resource dimension shows the limited budget in optimizing the KSB program, does not have adequate facilities and infrastructure, and in terms of Human Resources shows the limited amount of human resources, especially experts in the field of disaster. In conclusion, the optimization of disaster preparedness village in disaster mitigation in the city of Balikpapan East Kalimantan province has been implemented quite well.

Keywords: Disaster Preparedness Village; Disaster Resilient Village; Disaster Mitigation



ABSTRAK

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianggap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, namun masih memiliki resiko bencana. Lebih jauh lagi hingga kini, belum ada penelitian yang membahas tentang optimalisasi dari adanya Kampung Siaga Bencana sebagai bagian dari solusi menghadapi bencana. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian adalah kualitatif. Penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi pada pengumpulan data penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dimensi tujuan menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tujuan dari terbentuknya KSB namun masyarakat belum memahami berbagai bentuk mitigasi bencana yang ada. Dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB dengan jumlah KSB yang dibentuk. Dimensi sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan anggaran dalam optimalisasi program KSB, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan dari segi sumber daya manusia menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama tenaga ahli dibidang kebencanaan. Kesimpulannya, optimalisasi kampung siaga bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cukup baik.

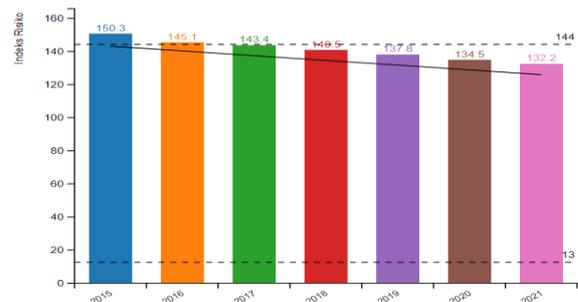
Kata Kunci: Kampung Siaga Bencana; Kelurahan Tangguh Bencana; Mitigasi Bencana

PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan bencana daerah atau biasa dikenal dengan (BPBD) ialah lembaga pemerintah non kementerian yang melakukan tugas penanggulangan bencana di wilayah Provinsi ataupun Kota/Kabupaten dengan berpedoman pada kebijakan yang diresmikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bersumber pada Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa“...pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD”. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, maka BPBD Kota Balikpapan bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana dengan mengembangkan suatu model kebijakan penanggulangan dan mitigasi yang berbasis masyarakat yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB).

Penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ialah penerapan aktivitas kesiapsiagaan secara kelembagaan baik teknis ataupun administratif bisa dilaksanakan BNPB dan BPBD. Program ini awalnya berskala nasional dan kini telah berkembang menjadi konsep Kawasan Siaga Bencana, yang melibatkan wilayah lebih luas

daripada hanya wilayah administratif. Berdasarkan data dari Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diinput oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana indeks risiko rata - rata nasional terjadinya bencana di Indonesia adalah sebagai berikut.



Sumber: dibi.bnpp.go.id

Gambar 1. Data Indeks Risiko Rata-Rata Nasional Terjadinya Bencana Tahun 2015-2021

Kalimantan Timur merupakan satu dari 38 provinsi di Indonesia. Wilayah provinsi ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari lahan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1500 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0 hingga 50%. Fakta ini tercatat dalam tabel indeks risiko Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga 2021. Selama periode tersebut, nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten tinggi, dengan potensi ancaman seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KLS RISIKO 2021
1	BERAU	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	TINGGI
2	PASER	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	TINGGI
3	KUTAI TIMUR	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	TINGGI
4	KUTAI BARAT	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	TINGGI
5	MAHAKAM ULU	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	TINGGI
6	PENAJAM PASER UTARA	160.40	160.40	160.40	160.40	160.40	158.32	151.67	TINGGI
7	KOTA BONTANG	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.89	SEDANG
8	KOTA BALIKPAPAN	159.20	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	123.46	SEDANG
9	KUTAI KARTANEGARA	160.40	135.52	129.84	124.79	124.79	119.16	119.16	SEDANG
10	KOTA SAMARINDA	134.80	111.30	110.35	109.95	102.94	102.94	101.05	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: Buku IRBI, 2021 Diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 6 Kabupaten/Kota yang memiliki kelas risiko yang tinggi dan 4 Kabupaten/Kota yang mempunyai kelas risiko sedang. Kota Balikpapan tergolong ke dalam risiko kelas sedang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Kota Balikpapan akan menjadi di tingkat kelas tinggi. Oleh karena itu, mitigasi bencana dan budaya sadar akan bencana penting untuk diterapkan untuk meminimalisir risiko bencana, salah satunya dengan program Kampung Siaga Bencana.

Kampung Siaga Bencana atau dikenal dengan sebutan KSB merupakan program Dinas Sosial yang tentu bekerja sama dengan BPBD Balikpapan atas kesepakatan bersama dengan pihak masyarakat di daerah rawan bencana seperti di Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Timur. Dalam KSB ini masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana khususnya Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Selatan diberdayakan dengan meningkatkan kapasitas sekaligus memberdayakan adanya suatu prasarana penanggulangan dan mitigasi bencana tingkat komunitas seperti sosialisasi penanggulangan dan mitigasi bencana, gardu sosial yang didalamnya dilengkapi

cara-cara lokal untuk penanggulangan bencana (KSB Kemensos Indonesia 2011).

Kampung Siaga Bencana di Kota Balikpapan telah dibentuk pada level Kecamatan. Dengan didirikannya KSB di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur diharapkan kemampuan masyarakat dalam upaya mitigasi akan bertambah, karena dengan adanya KSB ini masyarakat sedikit demi sedikit akan terbiasa dan terlatih serta siap siaga dalam mengurangi maupun menangani risiko terjadinya bencana alam, rasa solidaritas yang tinggi dan semangat gotong-royong tentunya sangat dibutuhkan. Mengingat sekarang mitigasi adalah hal yang penting dilakukan jika sejak dulu yang difokuskan hanya pada pasca bencana namun, di saat sekarang mitigasi bencana adalah hal yang penting untuk diketahui dan dibiasakan oleh masyarakat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana, khususnya masyarakat Kota Balikpapan. Upaya mitigasi yang dilakukan seperti pemetaan risiko bencana khususnya dalam hal tata ruang dan pengembangan wilayah untuk mengurangi risiko bencana

serta membentuk program Kampung Siaga Bencana.

Bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang paling sering terjadi di Balikpapan. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Kampung Siaga Bencana berdasarkan kondisi

indeks risiko bencana di beberapa kecamatan di Kota Balikpapan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Balikpapan, berikut jumlah kecamatan yang ada di Kota Balikpapan beserta kampung siaga bencana yang sudah terbentuk.

Tabel 2. Kecamatan di Kota Balikpapan

No.	Kecamatan	KSB yang Terbentuk	Jumlah
1	Balikpapan Utara	Belum Ada	0
2	Balikpapan Selatan	Ada	1
3	Balikpapan Timur	Ada	1
4	Balikpapan Barat	Ada	1
5	Balikpapan Tengah	Belum Ada	0
6	Balikpapan Kota	Belum Ada	0

Sumber: Informasi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Balikpapan, 2022

Tabel tersebut menegaskan bahwa dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Balikpapan, tercatat 3 (tiga) kecamatan yang sudah memiliki KSB. Sementara itu masih ada 3 (tiga) kecamatan lainnya yang belum membentuk KSB. Pemerintah Kota Balikpapan secara bertahap membangun KSB di Kota Balikpapan dan penulis berpendapat bahwa penting untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam membentuk KSB di tiga kecamatan yang belum memiliki KSB.

Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh wilayah Kota Balikpapan memiliki jaringan kesiapsiagaan yang solid untuk menghadapi potensi risiko bencana dan meminimalkan dampak yang mungkin timbul.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji mitigasi bencana, cukup banyak dilakukan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pangestu & Fedryansyah (2023) bahwa implementasi mitigasi bencana dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui kebudayaan lokal, keterampilan lokal, dan pengetahuan lokal. Kiswanto (2016) menunjukkan bahwa pembentukan desa siaga bencana menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan kegiatan manajemen penanggulangan bencana sebagai bentuk solusi atas bencana yang telah terjadi. Sementara (Muhdi et al., 2022) menjelaskan desa siaga bencana dibentuk sebagai upaya pencegahan bencana atau sebelum terjadinya bencana. Berikutnya disebutkan oleh Gunawan (2015) bahwa dalam rangka kesiapsiagaan bencana, maka pemerintah perlu bersatu dengan masyarakat. Untuk mendukung kesiapsiagaan bencana maka dibutuhkan adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan secara rutin dan berkala (Febriana et al., 2015). Adanya eksistensi kampung siaga bencana diharapkan mampu mengelola logistik dan menanggulangi korban bencana (Cahyono, 2019). Terbentuknya kampung siaga bencana tersebut merupakan salah satu bentuk dari adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana (Hadjaratin, 2016). Hal tersebut berkesesuaian dengan salah satu prinsip utama dari adanya kampung siaga bencana yaitu adanya kemandirian masyarakat (Trisnawati, 2023).

Merujuk uraian tersebut, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian mengkaji dari aspek implementasi, eksistensi, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, penulis meskipun memiliki fokus penelitian yang

sama yaitu mitigasi bencana tetapi penulis membahasnya dari sudut pandang optimalisasi. Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

KAJIAN TEORI

1. Optimalisasi

Optimalisasi merujuk pada pencapaian hasil sesuai harapan dengan cara yang efektif dan efisien (Poerwadarminta, 2003). Hal ini juga dapat diartikan sebagai ukuran ketika semua kebutuhan terpenuhi melalui kegiatan yang dilakukan. Optimalisasi melibatkan upaya meningkatkan kinerja baik pada tingkat unit kerja maupun tingkat personal yang terkait dengan kepentingan umum, dengan tujuan mencapai kepuasan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut (Nurrohman, 2017). Menurut Sidik (2002), terdapat beberapa indikator yang perlu diidentifikasi dalam optimalisasi untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berupa maksimasi atau minimasi. Maksimasi digunakan ketika fokus optimalisasi adalah pada aspek profit, penerimaan, dan sejenisnya. Dalam menetapkan tujuan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, berbagai pilihan harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya, seperti barang, peralatan, atau jasa, merupakan elemen

yang harus dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Keterbatasan sumber daya memerlukan proses optimalisasi oleh para pelaksana. Dengan cara ini, optimalisasi memberikan manfaat dalam mengidentifikasi masalah dan kendala dalam suatu sistem, serta membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan solusi yang tepat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dari Sidik (2002) yang menyebutkan bahwa optimalisasi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan dengan kegiatan/tindakan yang tujuannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dengan konsep tersebut akan dianalisis mengenai sejauh mana optimalisasi pelaksanaan kegiatan kampung siaga bencana yang berbasis partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam hal mitigasi bencana dengan beberapa dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi.

2. Kampung Siaga Bencana (KSB)

Program Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengatasi bencana melalui donasi sosial berbasis masyarakat. Pendekatan partisipatif digunakan dalam KSB untuk mengubah sikap dan tindakan warga terkait penanggulangan bencana (mitigasi). Tujuan utama KSB adalah mempersiapkan masyarakat agar dapat mengelola kerentanan, ancaman, dan risiko di wilayahnya, dengan pendekatan rekayasa sosial (Yuliana, 2021). KSB melibatkan partisipasi masyarakat, yang dianggap krusial dalam upaya kesejahteraan dari perencanaan hingga evaluasi (Suharto, 2005). Program Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengatasi bencana melalui donasi sosial berbasis masyarakat. Pendekatan partisipatif digunakan dalam KSB untuk

mengubah sikap dan tindakan warga terkait penanggulangan bencana (mitigasi).

Tujuan utama KSB adalah mempersiapkan masyarakat agar dapat mengelola kerentanan, ancaman, dan risiko di wilayahnya, dengan pendekatan rekayasa sosial (Yuliana, 2021). KSB melibatkan partisipasi masyarakat, yang dianggap krusial dalam upaya kesejahteraan dari perencanaan hingga evaluasi (Suharto, 2005). Kampung yang berada di daerah rentan terhadap bencana menjadi fokus program KSB, termasuk yang memiliki potensi gempa, tanah longsor, gunung berapi, tsunami, banjir, dan bencana lainnya. Dengan demikian, KSB menjadi suatu program yang mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk selalu siaga dan memahami mitigasi yang tepat. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko kerusakan, korban jiwa, dan kerugian akibat bencana.

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat bencana alam. Dalam kata lain, mitigasi adalah persiapan yang dilakukan sebelum bencana terjadi (Fadhli, 2019). Upaya mitigasi bencana melibatkan pengurangan risiko dengan pengembangan fisik, kesadaran, dan peningkatan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi akibat bencana. Penanganan bencana mencakup empat kategori, yakni sebelum bencana (mitigasi), saat bencana terjadi (pencarian dan penyelamatan), dan setelah bencana (pemulihan). Dari keempat kategori tersebut, kegiatan mitigasi sebelum bencana dapat mengurangi dampak yang timbul dari bencana itu sendiri.

METODE

Penelitian Kualitatif dengan desain deskriptif artinya penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu ihwal keadaan serta tanda-tanda yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulannya secara induktif. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan dilapangan secara sistematis, terperinci, akurat serta terdapat fakta-fakta yang saling berhubungan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif, karena berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis pendekatan ini cocok digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan dan metode ini tepat untuk mendeskripsikan fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis dapat mencari tahu kabar-kabar yang terdapat di lapangan mengenai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan acara kampung siaga bencana berbasis partisipasi masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di Kota Balikpapan.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari s.d Februari 2023 di Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dikarenakan kota tersebut dianggap sebagai salah satu kota utama penyokong calon ibukota baru Indonesia atau IKN. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dimana orang tersebut dianggap paling tahu dan memiliki informasi yang penulis butuhkan (Sugiyono, 2020). Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Balikpapan, Staff Dinsos Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Balikpapan dan Ketua (Kepala Asuh) Kampung Siaga bencana. Penulis menggunakan wawancara semi

terstruktur. Jenis wawancara tersebut dipilih karena dalam wawancara semi-terstruktur bersifat fleksibel sampai batas tertentu sambil mempertahankan pedoman penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Selain dengan melakukan wawancara semi-terstruktur, penulis melakukan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam Mitigasi Bencana di Kota Balikpapan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan teori optimalisasi dengan dimensi tujuan, sumber daya yang dibatasi, dan alternatif keputusan seperti dikatakan Sidik (2002) yang membagi Optimalisasi menjadi tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya. Optimalisasi berkaitan dengan suatu kegiatan, aksi atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pekerjaan sehingga dalam suatu proses kegiatan dapat mencapai tujuan yang sempurna, fungsional serta lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian dapat dilihat sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan

Dalam menentukan kegiatan agar bisa berjalan dengan optimal diperlukan tujuan yang jelas serta urutan rangkaian kegiatan yang dapat terlaksana secara baik sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara baik sehingga kegiatan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam hal ini program Kampung Siaga Bencana melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagai antisipasi (mitigasi) sebelum terjadinya bencana dengan 2 indikator, yaitu indikator perlindungan kepada masyarakat dan indikator upaya mitigasi bencana:

Dalam indikator perlindungan kepada masyarakat mencakup kepada bagian keselamatan yang mana ini adalah tujuan dari perlindungan masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua/Pengurus Kampung Siaga Bencana

Bapak M., ketika di kantornya Kelurahan Baru Tengah pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sebagai berikut.

“...Jika berbicara terkait masalah perlindungan dan keselamatan hal tersebut sudah menjadi hal yang memang harus diutamakan oleh setiap individunya. Dalam hal ini Dinsos bekerjasama dengan Kampung Siaga Bencana yang telah terbentuk di Kecamatan Balikpapan Barat, mengajak masyarakat untuk menjaga keselamatan diri sendiri, baru keselamatan warga sekitar”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi kampung siaga bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait bencana dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas SDM personil KSB dan pendalaman materi kepada personil KSB, pemahaman tentang pemahaman dalam pelaksanaan SOP dalam penanggulangan bencana, agar dapat dilaksanakan mitigasi, tanggap darurat, dan pelayanan terhadap korban bencana, pengelolaan logistik dan dapur umum di Posko Bencana.
- b. Melakukan sosialisasi dari anggota kepada masyarakat melalui ketua RT dan masyarakat secara langsung tentang tugas pokok dan fungsi setiap personil KSB
- c. Melakukan edukasi pemberian pelatihan pokok-pokok kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- d. Orientasi publik, konsultasi publik untuk melakukan penilaian terhadap kawasan yang berisiko terhadap potensi dan dampak yang ditimbulkan sehingga akan mudah melakukan dan menerapkan konsep mitigasi kebencanaan berdasarkan tipikal kawasan.

Indikator selanjutnya yaitu indikator upaya mitigasi bencana sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat,

masyarakat terlibat langsung dalam penyusunan kawasan risiko bencana yang berada di wilayah dalam kluster (per RT), masyarakat juga mengenali pemasangan rambu atau simbol alarm, *alert warning system* fungsi dan pemanfaatannya seperti jalur evakuasi dan rambu *master point*, serta masyarakat ikut peduli dan terlibat langsung baik dalam pencegahan, pengurangan, penanganan, dan pemulihan dalam kebencanaan. Untuk menjawab permasalahan mengenai pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana masyarakat hanya mengetahui bahwa mitigasi dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan ancaman namun, bentuk dari mitigasi bencana itu sendiri masyarakat belum sepenuhnya mengetahui.

Upaya penanganan bencana saat ini mengalami perubahan paradigma maupun tindakan. Masyarakat saat ini bukan hanya menjadi korban dari bencana tetapi juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Masyarakat harus ikut serta dalam mitigasi bencana sehingga metode yang tepat dilakukan yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan dengan mendorong semangat masyarakat dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki untuk menyiapkan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi dilingkungan. Dalam hal mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan rutin melaksanakan sosialisasi dan juga pemeriksaan ataupun pemeriksaan alat proteksi kebakaran di gedung-gedung baik pemerintahan maupun swasta yang ada di Balikpapan sebagai bagian dari bentuk mempertahankan kemampuan SDM dalam mitigasi bencana yang terkait dengan dimensi ketiga. Adapun berikut beberapa sosialisasi yang telah dilakukan BPBD Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun 2022.

Tabel 3. Sosialisasi BPBD di Kecamatan Balikpapan Barat

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat	Kelurahan	Jml. peserta (orang)
1.	Pelatihan Penanggulangan Bencana	10/02/2022	Dermaga Polairud Kaltim	Dit Polda Mulyo	38
2.	Mitigasi bencana dan Kebakaran	21/05/2022	Kantor Kel. Baru Ulu	Baru Ulu	32
3.	Pelatihan relawan KSB	12/11/2022	Kantor Balikpapan Barat	Kec. Margasari	74
4.	Sosialisasi pembentukan KATANA	7/12/2022	Aula Kantor Kec. Baru Ulu	Baru Ulu	45
5.	Sosialisasi Pelatihan terhadap pencegahan dan penanganan bencana	31/12/2022	Gazebo Perumahan Air	Margasari Atas	91

Sumber: BPBD Kota Balikpapan, diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan data sosialisasi tersebut menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan BPBD Kota Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Barat. Sosialisasi terkait mitigasi bencana bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat mulai dari pemahaman tentang materi hingga prosedur yang dapat diterapkan pada saat masyarakat menghadapi bencana (Muhlisah et al., 2021). Bahkan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat pada saat melakukan penyelamatan diri ketika bencana terjadi (Arisona, 2020). Sejalan dengan itu, Zuhdi et al. (2019) juga menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) capaian dari kegiatan sosialisasi yaitu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait resiko bencana, upaya penanggulangannya dan mengurangi rasa khawatir dari masyarakat ketika bencana terjadi. Bahkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi resiko bencana yang

terjadi (Fauzielly, 2018). Pernyataan tersebut mempertegas pendapat dari Jufriadi et al., (2012); Pahleviannur, (2019) bahwa salah satu bentuk dari edukasi sadar bencana adalah melalui sosialisasi kebencanaan. Terdapat hubungan signifikan antara sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, yaitu adanya pengetahuan masyarakat yang minim terkait kesiapsiagaan dan sadar bencana dapat disebabkan oleh kurang intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (Sopacua & Salakay, 2020).

Secara umum mitigasi bencana dibentuk dengan maksud untuk mengurangi risiko bencana dan tentu bertujuan untuk mencegah munculnya risiko baru. Upaya mitigasi yang telah dilakukan dengan adanya kampung siaga bencana yaitu dengan melakukan pendataan potensi kerentanan seperti yang ada di Kecamatan Balikpapan Barat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Potensi Kerentanan Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Barat

No.	Kelurahan	Potensi kerentanan Penyandang masalahkesejahteraan Sosial			Jumlah
		Lansia	Lansia terlantar	Disabilitas	
1	Baru tegah	800	4	32	836
2	Margasari	198	0	11	209
3	Baru Ilir	750	2	8	760
4	MargoMulyo	362	1	7	370
5	Baru Ulu	750	21	64	835
6	Kariangau	138	15	12	165
Jumlah		2.998	43	134	3.175

Sumber: Kampung Siaga Bencana, 2022

Berdasarkan data di atas masyarakat yang tergolong rentan yaitu lansia, lansia terlantar dan disabilitas. Kelompok rentan pada saat terjadi bencana menjadi prioritas karena dianggap sebagai korban yang lemah dan tak berdaya sehingga perlu dilindungi. Sudut pandang terhadap kelompok rentan yang seperti inilah yang harus diubah menjadi subjek yang perlu dilibatkan dalam aktivitas bencana baik saat mitigasi bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Dalam hal ini mitigasi yang tepat untuk dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan dengan mengelola risiko yang ada sehingga dapat menurunkan kerentanan serta memperkuat ketahanan. Strateginya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok rentan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi: "...Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana". Dalam kebijakan tersebut bentuk dari mitigasi struktural yang dapat diwujudkan banyak jenisnya seperti pembangunan gedung yang tahan bencana yaitu dengan struktur bangunan yang telah direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan ataupun jika mengalami bencana kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu membahayakan. Hal ini disebut dengan rekayasa teknis yaitu prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana. Contohnya pembuatan Daerah Aliran Sungai (DAS), alat pendeteksi bencana seperti gunung api atau tsunami, bangunan tahan gempa, ataupun *early warning system* sesuai fungsinya.

Pada saat di lapangan penulis melakukan wawancara dengan pengurus KSB, Bapak M. yang hasilnya adalah melalui kampung siaga bencana bentuk mitigasi struktural yang telah dilakukan yaitu membuat jalur evakuasi, masyarakat

juga telah mengenali alarm ataupun pertanda jika terjadi bahaya bencana dengan alat pentungan, semacam lonceng yang nyaring, masyarakat juga telah membuat sumur resapan, dan telah dibentuknya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Namun untuk *Early warning system* (EWS) belum ada sehingga peringatan dari bahaya bencana masih secara manual belum berbasis digital.

2. Alternatif Keputusan

Saat memiliki tujuan ada sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Dalam mencapai tujuan tidak serta merta berhasil tanpa adanya hambatan. Sehingga diperlukannya kebijakan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah suatu akhir dari proses pemikiran untuk menjawab tentang suatu masalah guna mengatasi masalah tersebut, dengan menentukan pilihan pada suatu alternatif keputusan. Dalam pengambilan keputusan biasanya ada beberapa pilihan alternatif agar lebih efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Mengenai alternatif keputusan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB dengan jumlah KSB yang dibentuk.

Dalam pelaksanaan program Kampung Siaga Bencana tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat enggan untuk ikut serta dalam menjalankan serangkaian kegiatan yang

sebagaimana diterapkan dalam KSB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana yang dimaksud bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung siaga bencana seperti:

- a. Masyarakat ikut merawat ketersediaan fasilitas instrument kebencanaan dilapangan;
- b. Masyarakat berperan aktif sebagai relawan yang berada dilingkungannya;
- c. Masyarakat terlibat langsung dalam konsep WASIAT (Warga Siaga Kesehatan);
- d. Masyarakat terlibat aktif dalam menentukan konsep pelatihan yang akan diberikan berdasarkan typical kawasan lingkungan RT (saat ini yang baru terlaksana adalah penanganan proteksi kebencanaan ditingkat keluarga, cara mengatasi kegagalan kompor dan tabung gas serta penggunaan APAR).

Dalam hal ini partisipasi masyarakat mengenai mitigasi bencana sebagaimana kampung siaga bencana sebagai wadahnya dapat dikatakan antusias namun tidak seluruh dari jumlah masyarakat yang ada serta pengetahuan seputar mitigasi bencana belum tergolong mumpuni. Pembentukan kampung siaga bencana telah dilakukan di beberapa kecamatan namun yang aktif hingga sekarang hanyalah KSB yang ada di Balikpapan Barat. Berikut kampung siaga bencana kelurahan dalam kecamatan Balikpapan Barat.

Tabel 5. KSB di Kecamatan Balikpapan Barat

No.	KSB Kelurahan dalam Kecamatan Balikpapan Barat	Pengurus KSB	Relawan Aktif Masyarakat Non Pengurus	Keterangan
1.	Baru Tengah	17 orang	34 orang	SK ada
2.	Margasari	17 orang	32 orang	SK ada
3.	Baru Ulu	27 orang	26 orang	SK proses
4.	Margo Mulyo	23 orang	22 orang	SK proses
5.	Baru Ilir	32 orang	32 orang	SK proses
6.	Kariangau	17 orang	17 orang	SK proses

Sumber: KSB Balikpapan Barat, 2022

Pembentukan KSB di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, dicanangkan sejak 2016, perencanaan anggaran dicantumkan oleh Dinas Sosial 2018-2020, kemudian terjadi pandemi Covid-19, kebijakan anggaran pemerintah Kota Balikpapan di fokuskan pada penanganan Covid-19. Kebijakan anggaran pemerintah yang terbatas sehingga mengupayakan melalui CSR dari perusahaan untuk membantu. Terealisasi di pertengahan tahun 2020, namun karena masih pandemi ditunda pada tahun 2021, dibantu oleh Pertamina RU V Balikpapan tetapi hanya untuk dua kelurahan yakni Kelurahan Margasari dan Baru Tengah. Sedangkan kelurahan lainnya, pembentukannya dilakukan oleh prakarsa mandiri yaitu Tim KSB Balikpapan Barat dan dana yang dibutuhkan tidak dibantu oleh pihak manapun. Inisiatif para pengurus kecamatan untuk membantu pemerintah agar masyarakat siap siaga di masing-masing Kelurahan yang belum terbentuk yakni mulai dari Baru Ulu, Margo Mulyo, baru Ilir dan Kariangau. *Roadshow*

pembentukan di kelurahan lain baru dapat terlaksana pada awal November hingga Desember 2022. Proses SK sampai saat ini masih berproses, karena terjadinya mutasi ASN setingkat Lurah dan Kepala Seksi, sehingga proses SK menyesuaikan dengan pejabat yang baru yakni Lurah yang telah dilantik, dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan *roadshow* beberapa Kelurahan mengalami kekosongan khususnya Margo Mulyo tugas dilaksanakan oleh Plt Lurah, Kelurahan Baru Ilir Lurah nya di mutasi, Lurah Kariangau bersifat Plt.

Sebagaimana hasil koordinasi dengan BPBD Kota Balikpapan tentang forum kajian Risiko Bencana, diharapkan setiap Kelurahan dapat dibentuk pula Kelurahan Tangguh Bencana, maka pada kegiatan *roadshow* yang dimaksud diikuti sertakan sosialisasi dan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) dengan jumlah pengurusan sebagai berikut:

Tabel 6. KATANA Kelurahan dalam Kecamatan Balikpapan Barat

No.	KATANA Kelurahan Dalam Kecamatan Balikpapan Barat	Personil Pengurus	Relawan Masyarakat Non Pengurus	Aktif	Keterangan
1.	Baru Tengah	Tidak ada	54 orang		Pembentukan Februari 2022
2.	Margasari	Tidak ada	32 orang		Pembentukan Februari 2022
3.	Baru Ulu	30 orang	11 orang		SK masih proses
4.	Margo Mulyo	33 orang	11 orang		SK ada
5.	Baru Ilir	36 orang	28 orang		SK proses, Lurah mutasi dan kosong
6.	Kariangau	17 orang	17 orang		SK proses, Lurah baru dilantik.

Sumber: Kecamatan Balikpapan Barat, 2022

Kelurahan Tangguh Bencana atau dikenal dengan sebutan KATANA merupakan program yang dibentuk oleh masyarakat yang berkolaborasi langsung dengan Badan Penanggulangan Badan Daerah. Kota Balikpapan. KATANA ini bersifat membangun dan mengajak serta mengarahkan kepada keluarga di masyarakat bagaimana menghadapi bencana, baik sebelum terjadi, saat terjadi bencana maupun setelah terjadinya bencana melalui sosialisasi dan simulasi pelatihan yang dilakukan BPBD Kota Balikpapan.

Dalam kesesuaian kebijakan dari program kampung siaga bencana dalam upaya mitigasi, disini pemerintah menyelaraskan segala tindakan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat dilapangan. Sehingga dibuatlah beberapa percobaan dalam melakukan sosialisasi dan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana) yang berbeda institusi yaitu KSB oleh Dinas Sosial, KATANA oleh BPBD.

Menurut Bapak M. selaku Ketua Kampung Siaga Bencana dengan dibentuknya program KSB ini relevan dengan permasalahan yang terjadi khususnya di daerah yang rawan bencana di Kota Balikpapan, beliau mengatakan bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana

yang di maksud dalam beberapa kebijakan. Kebijakan yang dimaksud yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Relawan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Benana
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan
7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan

Pada BAB VI Penyelenggaraan Bencana, Bagian Kesatu Umum, Pasal 19 pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2018, menyebutkan

bahwa: "...Penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kota Balikpapan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek yaitu Sosial ekonomi dan Budaya masyarakat, Kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, Kemanfaatan dan efektifitas dan Lingkup luas wilayah bencana ". Demikian pula dalam hal mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam rangka mengurangi risiko bencana yang

terjadi meskipun bukan melalui KSB tetapi melalui KATANA. Terkait mitigasi ini tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, maka yang menjadi isu strategis pembangunan lima tahun kedepan serta hubungannya dengan arah pembangunan RPJMD Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Arah Pembangunan RPJMD Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Arahan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<p>Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Pencapaian target menurunkan Indeks Risiko Bencana, yang memerlukan adanya penyediaan sarana, prasarana yang memadai, sumber daya aparatur dan masyarakat yang berkompeten serta penyiapan <i>Standart Operational Prosedur</i> yang sesuai peraturan perundang-undangan. b) Peningkatan sarana, prasarana, kapasitas SDM dan SOP yang mampu mempresentasikan kesiapan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN Baru, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, seperti drone, robot pemadam, mobil kamera dan GPS navigasi unit. c) Memperkuat langkah-langkah kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga menjadikan kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di dalam Kota Balikpapan maupun di daerah/kota/negara lain sebagai bagian pembelajaran bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat Kota Balikpapan agar meminimalkan dampak, baik kerugian material maupun korban jiwa.

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Tabel 7 menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Balikpapan menitikberatkan pada transformasi menjadi kota terkemuka yang modern dan sejahtera dengan fondasi nilai madinatul iman. Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi penurunan risiko bencana, persiapan sebagai pintu gerbang IKN Baru dengan

teknologi canggih, dan penguatan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana. Tujuan utamanya adalah mencapai kota yang aman, berkualitas, dan minim risiko bencana melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berkaitan erat dengan pembentukan KSB, karena KSB sering menjadi wadah untuk melibatkan masyarakat secara langsung

dalam upaya tersebut. Transformasi Balikpapan sebagai kota terkemuka dan modern dapat dibangun melalui partisipasi masyarakat dalam program KSB dan pembentukan sejumlah KSB yang efektif. Dengan demikian, dimensi alternatif keputusan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan upaya konkret dalam menciptakan kesiapsiagaan bencana.

3. Sumber Daya

Indikator pada dimensi sumber daya yang penulis analisis adalah berkaitan dengan anggaran, sarana dan prasarana serta tenaga ahli. Lebih lanjut penulis bahas sebagai berikut:

Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan (mitigasi) terhadap bencana dimana targetnya adalah seluruh masyarakat Balikpapan Barat khususnya yang berada di daerah rawan bencana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua pengurus kampung siaga bencana Kecamatan Balikpapan Barat, menyampaikan bahwa anggaran yang diperlukan diperkirakan secara keseluruhan adalah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahunnya, namun yang diberikan tidak mencapai total tersebut. Beliau tidak memberikan rincian secara detail namun hanya memberikan keterangan diperuntukkan dalam hal apa saja anggaran tersebut digunakan seperti berikut:

1. Anggaran pembentukan KSB
 - a. Lingkup kegiatannya meliputi FGD, sosialisasi dan pembentukan
 - b. Pengadaan atribut seragam lapangan berupa PDL, PDH dan perlengkapan lain
 - c. Pengadaan alat kerja lapangan/toolkit lapangan
2. Anggaran yang mendukung berjalannya program KSB
 - a. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan
 - b. Pembiayaan sarana kerja sekretariat dan alat komunikasi lapangan dan pusat komando
 - c. Pembiayaan pengerahan personil,

transportasi

- d. Pembiayaan pengembangan kapasitas SDM personil.

Sementara itu, ketersediaan sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan atau program merupakan hal yang mendukung keberhasilan dalam proses mitigasi bencana. Ada beberapa proses mitigasi bencana yang terhambat dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bapak R.H, ST mengatakan bahwa:

“...Ketersediaan sarana dan prasarana memang terkadang menjadi masalah terutama saat proses pencegahan maupun penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan agar terjadi pembaruan sarana dan prasarana, sehingga alat kelengkapan baik dalam hal mitigasi maupun tanggap darurat dan pasca bencana dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan kualitasnya juga selalu baik”.

Sarana dan prasarana belum dapat mengoptimalkan jalannya program KSB sehingga KSB yang telah dibentuk belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang ada berupa pemberian tenda keluarga dari Dinas Sosial Kota Balikpapan yang biasa digunakan pada saat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Posko bencana. Kampung siaga bencana hanya memiliki gardu sosial atau sekretariat dan lumbung sosial sebagai wadah penyimpanan tenda keluarga dan untuk bahan makanan, namun untuk bahan makanan di pusatkan di Gudang Logistik Dinas Sosial Balikpapan. Atribut yang dimiliki hanya berupa kaos sebanyak 20 lembar dari Dinas Sosial Kota Balikpapan, sementara di tiap Kelurahan KSB telah terbentuk berdasarkan jumlah masing-masing personil. Sudah seharusnya setiap personil

KSB dapat diberikan bantuan seragam dan peralatan kerja yang memadai.

Di sisi lain merujuk pada tabel 7 di atas, pada poin b dapat dilihat bahwa memang dalam pengaplikasian program kebencanaan di lapangan sudah berjalan namun dibutuhkan peningkatan sarana prasarana dan SDM dengan capaian target menurunkan indeks risiko bencana agar terjadi kesesuaian dalam pelaksanaan program yang sudah dibentuk. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan antusiasme SDM dapat menjadi faktor pendukung dalam rangka penanggulangan kebencanaan (Sanjaya & Ulfa, 2015). Salah satu kontribusi dari sarana prasarana yang memadai dibutuhkan ketika prediksi/deteksi bencana dilakukan, misalnya untuk penyebarluasan informasi kebencanaan bagi masyarakat (Suri, 2015). Adanya pemulihan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu kegiatan tanggap darurat ketika bencana terjadi dalam rangka mengurangi resiko bencana (Syarifah et al., 2020).

Namun di sisi lain Asiri (2020) menemukan bahwa, meskipun sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki instansi terkait masih terbatas, ditemukan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana dapat terselenggara dengan baik. Meskipun begitu, adanya peningkatan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana dibutuhkan dalam rangka mewujudkan lokasi aman bencana (Fatta et al., 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya perencanaan dari berbagai aspek salah satunya perencanaan sarana dan prasarana pendukung, terkait dengan mitigasi bencana, sangat dibutuhkan. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Wibowo et al. (2019) bahwa adanya perencanaan mitigasi tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga pelibatan masyarakat melalui kerjasama dan kesadaran yang baik.

Di samping itu, dari segi sumber daya manusia menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama tenaga ahli dibidang kebencanaan, sebagai penunjang keberhasilan *Outcome* dari program yang telah dibentuk dan dilaksanakan. Adapun tenaga ahli dalam hal ini berwenang dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana berdasarkan typical bencana, penyusunan modul kajian pengurangan risiko bencana, penyusunan tindakan pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan kembali pasca bencana, penyusunan dan pelaksanaan materi pendidikan dan pelatihan serta penyusunan standart teknis dalam penanggulangan bencana. Heryati (2020) mengemukakan bahwa Adanya keterbatasan SDM yang memadai menjadi salah satu hambatan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan khusus kebencanaan (Anwar & Faridah, 2022).

Pengembangan SDM yang dilakukan secara formal (ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan) dan informal (membaca atau mempelajari literatur secara mandiri), diharapkan dapat mendorong pemahaman aparaturnya terkait dengan tahapan manajemen kebencanaan (DWulansari et al., 2017). Melalui kemampuan dan pendidikan yang dimiliki aparaturnya tersebut, menjadi salah satu upaya dalam melihat kualitas sumber daya manusia yang menangani kebencanaan (Sembiring & M, 2022). Dengan demikian, penulis menilai bahwa perlu dilakukan rekrutmen sumber daya manusia yang ahli dibidang kebencanaan untuk pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana di Kota Balikpapan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan memiliki

sumberdaya manusia dengan jumlah yang cukup dengan *skill* yang dimiliki masing-masing SDM namun, dari sisi masyarakat, sejak KSB terbentuk, tidak semua masyarakat paham bagaimana mitigasi bencana dan apa tujuan utama mitigasi bencana, sehingga sebagian masih ada masyarakat yang acuh. Dari hal tersebut penulis berpendapat bahwa seharusnya BPBD maupun pengurus KSB juga BPBD dan pengurus KSB perlu melakukan peningkatan *skill* untuk masyarakat dan aparatur. Permasalahan yang berkenaan dengan lingkungan terutama lingkungan yang cenderung individualisme sehingga meskipun petugas yang berwenang telah menghimbau, mengingatkan dan mengajak akan sulit terealisasi. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam menjalankan suatu kegiatan yaitu masyarakat masih banyak yang acuh terhadap keselamatan baik keselamatan diri sendiri, maupun oranglain dan lingkungan. Hal ini masih banyak ditemukan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, menumpuk di saluran air. Kemudian meski telah dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan, tidak sepenuhnya diperhatikan dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penulis menilai bahwa anggota KSB perlu secara rutin melaksanakan sosialisasi dalam upaya mitigasi sebagai reminder bagi masyarakat sekitar maupun anggota KSB itu sendiri. Sehingga, dengan dibiasakan akan menciptakan solidaritas di lingkungan masyarakat. Baik dari anggota KSB ataupun relawan yang tentunya juga melibatkan BPBD sebagai narasumber atau pendukung kegiatan. Di sisi lain, keberlanjutan dari program KSB dinilai penting. TAGANA yang ada disekitar lokasi KSB juga bisa menjadi pengelola dari program ini karena dianggap ahli dibidangnya dengan Pemerintah Daerah sebagai pembina yang tetap memberikan bimbingan dan dukungan secara berkelanjutan. Namun perlu adanya

kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai dasar hukum yang kuat agar Kampung Siaga Bencana dapat terlaksana secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam Mitigasi Bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimensi tujuan menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tujuan dari terbentuknya KSB namun masyarakat belum memahami berbagai bentuk mitigasi bencana yang ada. Dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB dengan jumlah KSB yang dibentuk. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung siaga bencana dengan ikut merawat ketersediaan fasilitas instrument kebencanaan di lapangan, berperan aktif sebagai relawan yang berada di lingkungannya, terlibat langsung dalam konsep WASIAT (Warga Siaga Kesehatan), terlibat aktif dalam menentukan konsep pelatihan yang akan diberikan berdasarkan *typical* kawasan lingkungan RT. Di samping itu, pembentukan kampung siaga bencana telah dilakukan di beberapa kecamatan namun yang aktif hingga sekarang hanyalah KSB yang ada di Balikpapan Barat. Dimensi sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan anggaran dalam optimalisasi program KSB, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan dari segi sumber daya manusia menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama tenaga ahli dibidang kebencanaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: 1) Dinas Sosial Kota Balikpapan di dorong untuk dapat meningkatkan perannya dan mengevaluasi program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Balikpapan Barat untuk mencapai target misi Kota Balikpapan dalam kebencanaan sesuai Renstra Kebencanaan Tahun 2021-2026 dan menciptakan inovasi baru dalam mitigasi bencana alam di Kota Balikpapan; 2) KSB dapat di dorong untuk tetap berjalan dan berperan aktif diwilayah kewenangannya masing-masing, agar upaya mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara merata di semua tingkatan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW; 3) Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi tentang bencana alam ataupun non alam dan juga fasilitas dari pemerintah agar pelaksanaan program kampung siaga bencana di Kota Balikpapan dapat terlaksana dengan baik; Perlu dilakukan prioritas anggaran untuk optimalisasi program KSB yang telah terbentuk dan peningkatan kemampuan SDM bidang kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. A., & Faridah, I. (2022). Analisis Motivasi Pegawai dalam Penanggulangan Kebakaran Selama Masa Pandemi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 8(2).
<http://159.223.71.124/index.php/jsb/article/view/37>
- Arisona, R. D. (2020). Sosialisasi Dan Simulasi Mitigasibencana Gempa Bumi Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswasdn 2 Wates Ponorogo. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/asanka.v1i1.1939>
- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i2.843>
- Cahyono, S. A. T. (2019). Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v43i3.2138>
- DWulansari, D., Darumurti, A., & Eldo, D. H. A. P. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v4i3.3600>
- Fadhli, A. (2019). *Mitigasi Bencana*. Gava Media.
- Fatta, F. N., Melinda, T., Fajariyah, R. A. A., Putro, D. A., Pratama, R. A., & Wardana, Z. A. (2020). Kajian Sarana Prasarana Pendukung Kesiapsiagaan Sekolah Terhadap Bencana Gempabumi Di Smp Muhammadiyah 3 Cawas. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jpig.v5i1.4054>
- Fauzielly, L. (2018). Sosialisasi Mitigasi Bencana Longsor Di Daerah Hambalang, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor. *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 7(1).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i1.14770>
- Febriana, Sugiyanto, D., & Abubakar, Y. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 2(3).
<https://jurnal.usk.ac.id/JIKA/article/view/5671>
- Gunawan. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana: Kasus Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman “Di Yogyakarta. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 19(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v19i2.30>
- Hadjaratin, A. (2016). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Melalui Kelompok Kampung Siaga Bencana. *Pekerjaan Sosial*, 15(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v15i1.69>
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Jufriadi, A., Ayu, H. D., Afandi, A., Rahman, M., Raehanayati, Ariyanto, S. V., Ika, & Suciningtyas, K. L. N. (2012). Sosialisasi “Pengurangan Resiko Bencana” Di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Sebagai Upaya Pendidikan Mitigasi Bencana. *Erudio*, 1(1).
- Kiswanto. (2016). *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Serang* [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].
<https://eprints.untirta.ac.id/743/>
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhdi, N., Fithriyah, I., Konginan, A., & Perkasa, G. D. (2022). Pembentukan Desa Siaga Bencana Sebagai Wujud Upaya Mitigasi Bencana Di Surabaya. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v4i1.2950>
- Muhlisah, N., Arpin, R. M., & Mukarramah, S. K. (2021). Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30605/atjpm.v2i2.1232>
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi Pelayanan E-Ktp Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6).
<https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Optimalisasi-Pelayanan-E-Ktp-Guna-Meningkatkan-Validitas-Data-Kependudukan-Di-Kecamatan-Majasari-Kabupaten-Pandeglang.pdf>

- Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1). <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203>
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.47267>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sanjaya, M., & Ulfa, M. (2015). Evaluasi Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran (Studi Kasus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II). *JMMR (Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit)*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmmr.v4i2.688>
- Sembiring, S. B., & M, R. K. P. (2022). Kapasitas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Melalui Pendistribusian Jaminan Hidup Dan Isian Hunian Tetap Masyarakat Desa Berastepu. *Jurnal Professional*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3318>
- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/101007120201>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (ke-2)*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Suri, N. K. (2015). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karodalem Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo. *Perspektif*, 8(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v5i1.172>
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., Ketut, I. D., & Kerta, W. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.31604/jips.v7i2.2020.398-407>
- Trisnawati, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mewujudkan Kampung Siaga Bencana (Ksb) Di Desa Sindangjaya. *Geoducation*, 4(1). <http://103.123.236.7/index.php/geoducation/article/view/6631>

- Wibowo, Y. A., Ronggowulan, L., Arif, D. A., Afrizal, R., Anwar, Y., & AyuFathonah. (2019). Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jpig.v4i2.3632>
- Yuliana, P. N. (2021). *Implementasi Program Kampung Siaga Bencana Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus di KSB Mahameru, Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zuhdi, M., Makhrus, M., Sutrio, S., & Wahyudi, W. (2019). Sosialisasi Tentang Mitigasi Bencana Tsunami dan Gempa Lombok Di Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(2). <https://doi.org/0.29303/jpmpi.v2i1.316>